

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN  
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD PADA  
DINAS PEMERINTAHAN KOTA PALEMBANG**



Sripsi oleh:

**TIARA GUMILLARY IRIN**

**51081003170**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

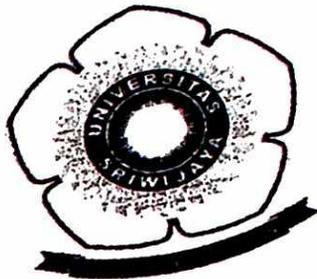
**Universitas Sriwijaya**

**Fakultas Ekonomi**

**PALEMBANG**

**2014**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN  
KAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD PADA  
DINAS PEMERINTAHAN KOTA PALEMBANG**



Skripsi oleh:

**TIARA GUMILLARY IRIN**

**51081003170**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Universitas Sriwijaya**

**Fakultas Ekonomi**

**PALEMBANG**

**2014**

## LEMBAR DRAFT SKRIPSI

### PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD PEMERINTAHAN PADA DINAS PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa : Tiara Gumillary Irin  
NIM : 51081003170  
Fakultas : Ekonomi  
Juzusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 19650816 1995121 001

Tanggal : 2/9/2014

Ketua



Abu Kosim, SE, MM, Ak  
NIP. 19620507 1995121 001

Tanggal : 2/9/2014

Anggota

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD PEMERINTAHAN PADA DINAS PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh:

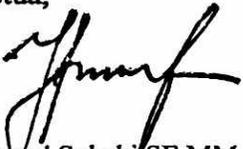
Nama Mahasiswa : Tiara Gumillary Irin  
NIM : 51081003170  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 23 September 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

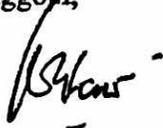
Palembang, 23 September 2014

Ketua,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 19650816 1995121 001

Anggota,



Abu Kosim, SE, MM, Ak  
NIP. 19620507 1995121 001

Anggota,



Hasni Yusriati, SE, M, AAC, Ak  
NIP. 19721215 2003122 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 19650816 1995121 001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tiara Gumillary Irin  
NIM : 51081003170  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Pada Dinas Pemerintah Kota Palembang

Pembimbing:

Ketua : Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
Anggota : Abu Kosim, SE, MM, Ak  
Tanggal Ujian : 23 September 2014

adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 23 September 2014



Tiara Gumillary Irin  
NIM. 510 8100 3170

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Tiara Gumillary Irin  
NIM : 51081003170  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Pada Dinas Pemerintah Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan *grammer*, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 23 September 2014

Ketua,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA

NIP. 19650816 1995121 001

Anggota,



Abu Kosim, SE, MM, Ak

NIP. 19620507 1995121 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA

NIP. 19650816 1995121 001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

***"Never give up, fix mistakes, keep stepping, think big and act now!"***

**("Jangan pernah menyerah, perbaiki kesalahan, terus melangkah, berpikirlah besar dan bertindaklah sekarang!")**

***"A fear will only make you weak and lose confidence, complaining will never solve the problem. Ignore the fear, stop complaining and take action!"***

**("Rasa takut hanya akan membuatmu lemah dan kehilangan keyakinan, mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Abaikan ketakutanmu, berhenti mengeluh dan segera bertindak!")**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- **Orang tuaku**
- **Adik – adikku**
- **Sahabat – sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Pada Dinas Pemerintah Kota Palembang”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiiiiinn ..

Palembang, 23 September 2014

Tiara Gumillary Irin

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil ‘alamin puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Pada Dinas Pemerintah Kota Palembang”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

1. Bapak Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA, selaku Pembimbing I dan juga Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Abu Kosim, SE, MM, Ak, selaku Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Para dosen penguji yang telah membantu dan memberikan kritik serta saran.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
6. Pejabat – pejabat SKPD dari seluruh instansi pemerintahan Kota Palembang yang telah menerima penulis dan memberikan data – data yang penulis butuhkan guna penulisan skripsi ini.

7. Orang tua tercinta, Mama dan Yanda yang tidak pernah berhenti juga tidak pernah lelah mendoakan serta selalu memberikan dukungan dan semangat hidup baik moril maupun materil.
8. Adik – adikku tersayang, Titis Viglyar Mahadi Bismar dan Mumtaz Naufal Aqil Murtadho yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Sahabat – sahabatku terkasih, Hj. Anggun Putri Oktaviani, S.Ked, Dimitri Indah Puspitasari, S.T, Mayleni, S.Kom, Agus Permana, A.Md yang dengan berbagai cara gak capek nyemangatin, juga marahin sama ngomelin biar penulis bisa segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman – teman Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang juga telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Aamiiiiinn ..

Palembang, 23 September 2014

Penulis,

Tiara Gumillary Irin

## ABSTRAK

### PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD PEMERINTAHAN PADA DINAS PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Oleh:  
**Tiara Gumillary Irin**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan secara simultan dan parsial terhadap pengelolaan APBD. Sampel penelitian ini adalah pejabat yang terkait dengan pengelolaan APBD pada seluruh dinas Pemerintah Kota Palembang berjumlah 17 dinas, masing – masing dinas 4 orang pejabat pengelola keuangan sehingga berjumlah 68 orang.

Metode pengambilan sampel adalah metode sensus, dimana populasi yang dijadikan sampel 59 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode analisa yang digunakan adalah model Regresi Linear Berganda dan analisis Regresi Moderasi. Untuk menguji hipotesis secara simultan dan parsial digunakan Uji F dan Uji t. Untuk menguji variabel moderasi digunakan Uji Nilai Selisih Mutlak.

Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD. Secara parsial akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD. Transparansi publik dan pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan

Palembang, 23 September 2014

Ketua,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 19650816 1995121 001

Anggota,



Abu Kosim, SE, MM, Ak  
NIP. 19620507 1995121 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 19650816 1995121 001

## ABSTRACT

### THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, AND CONTROL OF APBD MANAGEMENT WITH THE GOVERNMENT IN PALEMBANG LOCAL GOVERNMENT

By:  
**Tiara Gumillary Irin**

This research aims to examine the influence of accountability, transparency, and simultaneous and partial control to the APBD management with the government whether it strengthens or weakens the relationship between the independent and the dependent variables. The sample of this research is the concerned officers relating to the APBD management at all departments in Palembang municipality with the total number 17 departments, each department consists of 4 financial management officers, so the total is 68 officers.

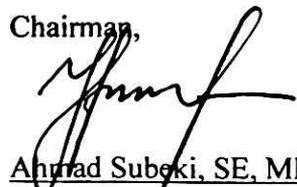
The method of sampling is census method, where the population sampled is 59 officers. The data in this research is the primary data. Data were collected by using a questionnaire distributed directly to the respondents. The method of analysis used in multiple linear regression model and regression analysis o moderation. To test the hypothesis simultaneously and partially, F-test and t-test the variable moderation, the Absolute Difference Value test is used.

The result of the research and the hypothesis test shows that simultaneously the variable of public accountability, public transparency and control significantly affect the APBD management. Partially public accountability significantly affect the APBD management. Public transparency and controlling had no significant relation to the management of APBD.

Key words: Accountability, transparency, controlling

Palembang, 23 September 2014

Chairman,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 19650816 1995121 001

Member,



Abu Kosim, SE, MM, Ak  
NIP. 19620507 1995121 001

Acknowledge by,  
Departement chair



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 19650816 1995121 001

## **RIWAYAT HIDUP**

**Nama Mahasiswa** : Tiara Gumillary Irin  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Palembang/5 Juli 1989  
**Agama** : Islam  
**Status** : Mahasiswa/Belum Menikah  
**Alamat Rumah** : Komp. Villa Melati Permai Blok. A No.001  
**Alamat Email** : nongyarra@yahoo.com

### **Pendidikan Formal**

**Sekolah Dasar** : SD KARTIKA II-2 Palembang  
**SMP** : Negeri 9 Palembang  
**SMA** : Negeri 6 Palembang

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DRAFT SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
ABSTRAK.....	x
RIWAYAT HIDUP.....	xii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Landasan Teori .....	7
2.1.1. Konsep Good Corporate Governance.....	7
2.1.2. Pengertian Keuangan Daerah.....	17
2.1.3. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	18
2.1.4. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.....	18
2.1.5. Akuntabilitas.....	19
2.1.6. Transparansi.....	21
2.1.7. Pengawasan.....	23
2.1.8. Value for Money.....	26

2.1.9. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu.....	30
2.3. Kerangka Pemikiran.....	33

### BAB III

METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.2. Jenis Penelitian.....	35
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5. Populasi dan Sampel.....	36
3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	37
3.7. Analisis Data.....	41

### BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Pengumpulan Data.....	46
4.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	47
4.2.1. Akuntabilitas ( $X_1$ ).....	48
4.2.2. Transparansi ( $X_2$ ).....	48
4.2.3. Pengawasan ( $X_3$ ).....	49
4.2.4. Pengelolaan APBD dengan Value for Money.....	49
4.3. Uji Kualitas Data.....	49
4.3.1. Uji Validitas Data.....	49
4.3.2. Uji Reliabilitas Data.....	53
4.4. Uji Normalitas Data.....	53
4.4.1. Uji One Sample Kolmogrov Smirnov.....	55
4.5. Uji Asumsi Klasik.....	55
4.5.1. Uji Multikolinearitas.....	55
4.5.2. Uji Heteroskedastisitas.....	56

4.6. Uji Hipotesis.....	58
4.6.1. Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
4.6.2. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	59
4.6.3. Uji F.....	60
4.7. Hasil Uji Hipotesis.....	61
4.7.1. Hasil Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan APBD.....	61
4.7.2. Hasil Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan APBD.....	62
4.7.3. Hasil Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD.....	63
4.7.4. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD.....	64
 BAB V	
PENUTUP.....	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran.....	68
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	69
 DAFTAR PUSTAKA.....	 71

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Selama satu dasawarsa Sumatera Selatan khususnya kota Palembang mengalami tingkat pertumbuhan yang berfluktuatif, yang terjadi karena tidak stabilnya perekonomian nasional yang diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi global yang semakin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan kota Palembang khususnya. Krisis ekonomi global telah melemahkan sektor dunia usaha dan investasi di daerah ini, sehingga pemerintah daerah khususnya kota Palembang mulai mencari alternatif untuk kembali menggairahkan perekonomian daerah.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga – lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga – lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas, transparan dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah atau yang lebih dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wujud dari akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan APBD dalam pelayanan masyarakat adalah dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi ini terlihat pada Kepres No.7 Tahun 1999 dimana pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah sampai eselon II untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan pentingnya keterbukaan informasi tentang kegiatan dan aktifitas Pemerintah Daerah juga diterbitkannya Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) tentang transparansi kegiatan dan aktifitas Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Ciri utama dalam pengelolaan APBD adalah akuntabilitas dan transparansi. Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya pengelolaan APBD yang baik (*Good Financial Governance*).

Tercapainya pengelolaan APBD yang baik itu juga tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan melekat). Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian APBD. Pengawasan APBD diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Pengelolaan APBD yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Pengelolaan APBD yang baik merupakan penerapan prinsip *Value for Money* (VfM) dan mutlak dilakukan. Implementasi prinsip *value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik. *Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money*

dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo: 2002).

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan APBD saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi publik oleh organisasi sektor publik seperti unit – unit kerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga – lembaga dan informasi perlu di akses pihak – pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Fenomena pengelolaan APBD ini terlihat bahwa informasi penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pengelolaan APBD secara terbuka cepat dan tepat kepada masyarakat belum di dapatkan masyarakat, publik tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan pemerintahan. Semua badan publik tidak memberikan disposisi secara tertulis soal dokumen rencana kerja atau rencana anggaran pada dinas/satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tidak mengumumkan hasil audit BPK setiap tahunnya.

Keterbukaan atau informasi yang di dapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan APBD adalah pada awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan (MUSREMBANG) pada berbagai tingkat. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan APBD dan tahap akhir pengelolaan APBD informasi dan keterlibatan publik

terputus, yang artinya publik hanya dilibatkan pada saat musyawarah rencana awal APBD. Pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan pembangunan adalah berdasarkan skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Pelaksanaan dari musyawarah rencana pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas tidak sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan.

Fenomena sehubungan dengan pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan pengelolaan APBD adalah: pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan pelaksanaan anggaran publik tidak mendapat akses (akuntabilitas rendah), pelaksanaan anggaran yang buruk, pemborosan anggaran atau anggaran yang tidak hemat, kelambatan melaporkan keuangan serta tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan Kota Palembang beberapa periode terakhir ini oleh BPK.

Fenomena lain yang terkait dengan pengelolaan APBD adalah masalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai memalukan karena beberapa periode terakhir ini LKPD selalu berstatus Disclameir. LKPD disclaimer tidak patuhnya para pengelola APBD terhadap ketentuan – ketentuan yang sudah ditetapkan.

SKPD – SKPD merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti karena pengelolaan inefisiensi, kebocoran dana, pemborosan dan selalu merugi. Tuntutan baru agar SKPD – SKPD meningkatkan pelayanan melalui perwujudan *value for money* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan pelayanan umum yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan *value for money* masih banyaknya anggaran belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi hasil minim,

anggaran digunakan tidak didasarkan pada kebutuhan/skala prioritas, penggunaan anggaran yang boros).

SKPD – SKPD seharusnya bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak didasarkan pada *value for money*. *Value for money* harus di operasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena dalam konteks otonomi daerah *value for money* merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai *good governance* yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif responsif dan akuntabel.

Dari uraian yang telah dijelaskan dan fenomena yang terjadi diatas dapat penulis ingin melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap pengelolaan APBD pada dinas Pemerintahan kota Palembang*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan APBD dengan *Value for Money* pada Instansi Pemerintah di Kota Palembang ?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan APBD dengan *Value for Money* pada Instansi Pemerintah di Kota Palembang ?
3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD dengan *Value for Money* pada Instansi Pemerintah di Kota Palembang ?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi, pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD baik secara simultan maupun parsial ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan *Value for Money*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan *Value for Money* secara simultan maupun parsial.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pihak – pihak sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencapaian akuntabilitas publik dan pengawasan dalam rangka pengelolaan APBD dan hubungannya dengan keberhasilan dinas dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.
2. Untuk memberikan masukan yang berarti bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai fungsi budgeting tentang pengelolaan APBD dengan *value for money*.
3. Untuk akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya pada khususnya dan bidang ilmu akuntansi sektor publik pada umumnya.

## Daftar Pustaka

- Antosius, F. Alijoyo. 2003. *Corporate Governance*, Edisi Kesatu. Jakarta: Prenhalindo.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Baswir, Revrison. 1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002.
- Faisal. 2003. *Mekanisme Corporate Governance*, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan. Makalah SNA X.
- Frediawan, Ridwan. 2008. Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada PT Jamsostek Kantor Cabang II Bandung. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Garini, Nadia. 2011. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kota Bandung. Bandung: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UNIKOM.
- Gaspersz, Vincent. 1998. *Manajemen Produktivitas Total*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardikasari, Eka. 2011. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006 - 2008. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Harryanto, dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herwidayatmo. 2003. Penerapan Prinsip GCG di Pasar Modal Indonesia, Investor Indonesia.
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Maksum, Azhar. 2005. Tinjauan Atas *Good Corporate Governance* di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1, Mei 2006.

- Maulidiah, Andi Lina. 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perum Perumnas Regional VII Cab. Sulsel I. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Moeljono, Djokosantoso. 2005. *Cultured*, Budaya Organisasi dalam Tantangan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Pieris, John dan Nizam Jim Wiryawan. 2008. Etika Bisnis & *Good Corporate Governance*, Edisi Kedua. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Prasetyo, Bambang & Lina Miftahul Jannah. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Teori, dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Priyatno, Dwi. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan *SPSS 20*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja BUMN. Jurnal Akuntabilitas Vol. 6, No. 2.
- Terry, George R, dan Leslie W. Rue. 2005. Dasar - Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tunggal, Iman, Sjahputra, dan Amin Widjaya Tunggal. 2002. Memahami Konsep *Corporate Governance*, Edisi Kedua. Jakarta: Harvarindo.
- Achmadi, Muslim, 2002, *Good Governance* dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Basri Yesi Mutia, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 8 Nomor1, 2008 : 29 - 39
- Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Budiartha Ketut, 2006, Menelusuri Opini Auditor Independen Atas LKPD Pemerintah Provinsi Bali, Universitas Udayana, Denpasar.
- Fatchurrochman, Agam ,2002, Manajemen Keuangan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Corruption Wact 23-25 Januari 2002 , Jakarta.
- Ghozali Imam, 2006, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta UPP YKPN Ikhwanulkarim Iwan,

2009, Dasar-Dasar Keuangan Sektor Publik, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Jakarta 2010.

Indriantoro, Supomo, 1999, Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta

-----, 2004, Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Pemerintah Daerah

Mardiasmo, 2001, Akuntansi Sektor Publik, Jogjakarta YKPN

-----, 2001, Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Andi, Jogjakarta

-----, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Jogjakarta

-----, 2006, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governace. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No.1, Mei 2006

Maryono, Werella, Kismartini, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah, Dialogue JIAKP, Vol. 4, No. Januari 2007 : 69 - 78

Mursyidi, 2009, Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Refika Aditama Bandung

Sopamah, Wahyudi Isa 2007 Pengaruh Akuntansi Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Jurnal Akuntansi.

Sopamah, Mardiasmo, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.

Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Panduan MUSREMBANG Kota Palembang

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Garini, Nadia, 2011, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kota Bandung